

Sry Mayunita, Muh. Askal Basir, Rajab, Putri Mawang Sari  
Email:  
@gmail.com

**Abstract:** This study aims to analyze the practice of monarchical power in modern contexts and its relationship with social inequality. Although formal monarchies have largely declined, similar patterns persist in the form of political dynasties, oligarchies, and elite domination within democratic systems. This research employs a qualitative approach using a literature review method based on various national and international scholarly articles discussing the relationship between power and inequality. The findings reveal that the concentration of power within certain groups, whether through hereditary mechanisms or control over economic and political resources, contributes to the reproduction of social inequality. Such practices create unequal access to economic opportunities, education, and political participation, thereby strengthening elite positions while weakening social mobility. Furthermore, the presence of political dynasties and oligarchic structures in democratic systems indicates that political modernization does not necessarily ensure an equitable distribution of power. This study concludes that modern forms of monarchical power practices are key factors in sustaining social inequality. Therefore, institutional reforms and stronger democratic mechanisms are necessary to promote a more equitable distribution of power and social justice.

**Keywords:** *monarchical power, political dynasties, oligarchy, social inequality, political elites*

**How to Cite:**



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## Introduction

Ketahanan pangan menjadi isu penting dalam kesejahteraan masyarakat dalam provinsi di Indonesia dan merupakan aspek yang penting dalam pembangunan serta keberlanjutan daerah namun kerentanan pada pangan atau kurangnya pangan yang dimiliki serta diakses menjadi masalah terutama bagi wilayah-wilayah secara geografis dan ekonomi salah satunya ialah Kepulauan Mentawai.

NO #	KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KABUPATEN	NAMA KABUPATEN	Tipe	TAHUN	IP	PERINGKAT KABUPATEN	KELONPOK
44	13	Sumatera Barat	1309	Kepulauan Mentawai	Kabupaten	2016	74,12	107	5
558	13	Sumatera Barat	1309	Kepulauan Mentawai	Kabupaten	2019	79,28	122	6
1072	13	Sumatera Barat	1309	Kepulauan Mentawai	Kabupaten	2020	46,67	302	2
1586	13	Sumatera Barat	1309	Kepulauan Mentawai	Kabupaten	2021	37,67	294	1
2190	13	Sumatera Barat	1309	Kepulauan Mentawai	Kabupaten	2022	52,48	373	3
2624	13	Sumatera Barat	1309	Kepulauan Mentawai	Kabupaten	2023	50,91	379	2

Birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan memiliki peran sentral tidak hanya merumuskan kebijakan, tetapi juga sebagai pelaksana dan pengawas terhadap jalannya kebijakan. Peran strategis birokrasi ini menempatkan birokrasi di posisi kunci dengan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga birokrasi dituntut untuk responsif, yaitu mampu menangkap permasalahan sosial secara cepat dan transparan terhadap aspirasi publik serta adaptif terhadap perubahan lingkungan, baik dari sisi regulasi ataupun kebutuhan masyarakat.

- Responsivitas birokrasi merupakan indikator penting dari

sistem pemerintahan yang baik, birokrasi yang responsif akan membentuk sistem pelayanan publik yang proaktif, dan mendengarkan kritik serta terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat, namun birokrasi yang tidak responsif memiliki kecenderungan menutup diri, mempertahankan status quo, dan menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Dalam pengelolaan sumber daya alam, responsivitas menjadi

<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/indexpermasalahan> INI ADALAH HALAMAN JOURNAL TEMPLATE penting melalui pengambilan keputusan terkait perizinan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat adat.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, birokrasi yang efisien dan responsif merupakan prasyarat penting untuk mencapai pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (Mustanir, Yusuf, and Sellang 2022)

Birokrasi hadir sebagai instrumen negara yang rasional, netral dan profesional melalui pengelolaan sumber daya alam, birokrasi memiliki peran untuk melindungi kepentingan ekologis dan menjamin keadilan distribusi manfaat. Sebaliknya, praktik yang terjadi tidak mencerminkan kepentingan dan

keadilan, melainkan menjadi sumber utama penyimpangan di birokrasi, khususnya pemberian izin usaha pertambangan yang memiliki kerugian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Pengelolaan sumber daya alam, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki kerentanan ekologis sehingga birokrasi memiliki peran sebagai pelindung kepentingan lingkungan dan masyarakat pesisir diatur melalui uu no. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara eksplisit menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut harus mengutamakan keberlanjutan ekologis dan partisipasi masyarakat sekitar.

Namun, praktiknya birokrasi memberikan permasalahan bukan solusi untuk mendukung keberlangsungan ekologis, kelemahan pengawasan birokrasi memberikan kesempatan untuk membuka celah bagi eksploitasi yang merusak, birokrasi yang seharusnya memiliki fungsi melindungi justru menjadi sumber utama penyimpangan izin seperti di Raja Ampat

Birokrasi yang lemah terhadap tekanan politik dan ekonomi mampu disetir untuk tunduk pada kepentingan individu dan lemahnya sistem akuntabilitas dan pengawas memberikan kesempatan terbuka terhadap perizinan yang di mana kebijakan antara pusat dan daerah sudah tumpang tindih sehingga dimanfaatkan oleh oknum birokrat yang mengaburkan permasalahan. Fakta terkait birokrasi yang sering gagal dengan tidak menegakkan regulasi sudah mencerminkan patologi birokrasi, seperti pemberian izin tambang di kawasan

konservasi raja ampat yang menerapkan undang-undang justru membuka kesempatan bagi patologi birokrasi, oleh karna itu penting untuk mengkaji fenomena ini dengan memanfaatkan literatur review dan menemukan arah perbaikan tata kelola birokrasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

## Metode

## Literatur Review

## Result and Discussion

## Conclusion

## Acknowledgments

## References

- Anderson, B. (1991). *Imagined Communities*. Verso.
- Appiah, K. A., Benhabib, S., Young, I. M., & Fraser, N. (2007). *Justice, Governance, Cosmopolitanism, and the Politics of Difference: Reconfiguration in a Transnational World. Distinguished W.E.B. Du Bois Lectures*. <https://doi.org/10.1039/c3an0211k>
- Bauman, Z. (2003). *Intimations of Postmodernity. Canadian Journal of Sociology / Cahiers canadiens de sociologie* (Vol. 18). Taylor & Francis e-Library. <https://doi.org/10.2307/3340842>
- Hikmawan, M. D. (2017a). Pluralisme Demokrasi Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(2), 223–247. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i2.2678>
- Hikmawan, M. D. (2017b). Politik Perbedaan: Minoritas dalam Implementasi Kebijakan. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, 1(1), 88–98.

- Hikmawan, M. D. (2020). *Consensual Democracy: A Challenge for Differentiated Citizenship. International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net* (Vol. 11). Retrieved from www.ijicc.net
- Hikmawan, M. D., & Hidayat, R. (2016). Depoliticisation of Public Issue : Low Degree of Government ' S Democratic Legitimacy. *Journal of Governance*, 1(1), 23–37.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jog.v1i1.1311>
- Hikmawan, M. D., Ika Indriyany, A., & Ma'asan Mayrudin, Y. (2019). *Environmental Movement Against Mining Exploration in Bojonegara Serang Banten.*
- Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). *Hegemony and Socialist Strategy. Verso.*  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Mouffe, C. (1993). *The Return of the Political. Verso.*
- Rawls, J. (2001). *Justice as fairness. Contemporary Political Theory: A Reader.* The Belknap Press of Harvard University Press.  
<https://doi.org/10.4135/9781446215272.n2>
- Sidel, J. T., & Paredes, O. T. (2000). Capital, coercion, and crime: bossism in the Philippines. *Choice Reviews Online*, 38(04), 38-2396-38-2396.  
<https://doi.org/10.5860/choice.38-2396>.